

Perbandingan Pengaruh Komite Audit Terhadap CSR Di Perusahaan Publik (Studi Komparasi: Negara Indonesia Dan Malaysia)

Eni Kaharti

*Departement of Accountant, Universitas Putra Bangsa
Email: enikarahajeng198.stiepb@gmail.com*

Abstract

This study aims to compare the influence of audit committees on CSR carried out by public companies listed on the stock exchange before and during the Covid-19 pandemic. The sub-sectors used are finance, food and real estate. The data used are secondary data for 2019 and 2020. What is being tested is the effect of audit committees on comparative CSR in two countries, namely Indonesia and Malaysia in 2019 and 2020. The amount of data used by Indonesia is the finance sector (198 companies), food (46 companies), and property (92 companies) a total of 336 companies. For Malaysia, the finance sector (56 companies), food (48 companies), and property 172 (companies), a total of 276 companies. Variable X (Audit Committee) Variable Y (CSR), Control Variables used are profitability and liquidity. During normal times and during endemic covid 19 audit committees in Indonesia and Malaysia both had a positive and significant effect on CSR. The research was only conducted on certain companies (finance, food and property), not all companies listed on the Indonesian and Malaysian Stock Exchanges. This study specifically examines and compares the influence of audit committees on CSR in normal and pandemic times in two countries, Indonesia and Malaysia.

Keywords: *Audit Committee, CSR*

PENGANTAR

CSR (Corporate Social Responsibility) sudah diatur secara tegas di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Setelah itu tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) pasal ini menyatakan kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Marnelly,2012).

Corporate governance (tata kelola perusahaan) telah menjadi salah satu bahasan penting dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa yang akan datang setelah Indonesia dan di berbagai ne- gara Asia lainnya mengalami krisis

ekonomi pada pertengahan tahun 1997 (Zhuang et al., 2001, dalam Dwiridotjahyono, 2009). Pendapat para ahli bahwa kelemahan dalam penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) merupakan salah satu sumber utama kerawanan ekonomi yang menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia dan di berbagai Negara Asia lainnya. Kajian Booz-Alen & Hamilton pada tahun 1998 (seperti yang dikutip oleh Djalil, 2000) menunjukkan bahwa indeks good corporate governance di Indonesia dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang adalah yang paling rendah. Dalam kajian yang sama ditemukan bahwa indeks efisiensi hukum dan peradilan juga paling rendah. Dwiridotjahyono (2009)

Elemen GCG menurut Supriyono et al., 2015 terdiri dari Dewan Komisaris, Kompetensi komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite audit, Proporsi komite auditor Independen dan kepemilikan manajerial. Komite audit menjadi bagian penting dalam pelaksanaan GCG (Good Corporate Governance)

Apothami, Tashakor (2017) Komite audit, sebagai badan pembuat keputusan inti, diharapkan untuk memantau praktik pelaporan keuangan dan non-keuangan dan meminimalkan asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan (Karamanou dan Vafeas 2005). Menurut Komite Pita Biru (BRC 1999: 7), AC dianggap sebagai 'pemantau utama' dalam proses pelaporan kegiatan perusahaan. Meskipun peran AC secara tradisional berfokus pada pengungkapan keuangan wajib, peran ini telah meluas dengan meningkatnya tekanan dari para pemangku kepentingan untuk memasukkan pengungkapan CSR setelah runtuhnya seperti Enron dan WorldCom di Amerika Serikat (AS), dan HIH dan One.Tel di Australia (Kolk dan Pinkse 2010) Penerapan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS), yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan, juga telah memperkuat peran ACs yang lebih luas untuk mengawasi pengungkapan wajib dan sukarela seperti CSR. Menurut penelitian, adopsi IFRS kemungkinan akan mendorong perusahaan untuk memiliki mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif seperti AC untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan perusahaan (Li and Yang 2015; Verriest et al. 2013). Kompleksitas dan sifat ketat tambahan dari IFRS juga bisa menjadi alasan bagi para pemangku kepentingan untuk menekan AC agar fokus pada peran mereka yang lebih luas. Peran ACs yang lebih luas saat ini lebih condong untuk memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan jangka panjang pada pemangku kepentingan (Be´dard et al. 2008; Jamali et al. 2008; Kolk dan Pinkse 2010). Di bawah payung sistem tata kelola perusahaan, perusahaan didorong untuk bertanggung jawab tidak hanya untuk keterlibatan CSR, tetapi juga untuk pengungkapan CSR (Choi et al. 2013; Jamali et al. 2008). Karena AC adalah salah satu elemen kunci dari sistem tata kelola perusahaan yang dibebankan secara khusus dengan transparansi

dan kredibilitas semua kegiatan perusahaan, penciptaan dan karakteristiknya cenderung mempengaruhi pilihan pengungkapan manajerial dan karenanya tingkat pengungkapan CSR. Menurut Be'dard et al.

Survei Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sekitar 88 persen perusahaan terdampak pandemi selama enam bulan terakhir, dan mengalami kerugian. Bahkan disebutkan, 9 dari 10 perusahaan di Indonesia terdampak langsung pandemi Covid-19. Data tersebut berdasarkan survei yang dilakukannya melalui online, termasuk melalui telepon dan email terhadap 1.105 perusahaan yang dipilih secara probability sampling sebesar 95 persen dan margin of error (MoE) sebesar 3,1 persen pada 32 provinsi di Indonesia.

"Kerugian tersebut umumnya disebabkan penjualan menurun, sehingga produksi harus dikurangi," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono di Jakarta, Selasa (24/11).

Berdasarkan survei yang dilakukan Kemnaker bekerja sama dengan Indef ini, penurunan permintaan, produksi, dan keuntungan umumnya terjadi pada perusahaan UMKM, yaitu di atas 90 persen. Sementara perusahaan yang terdampak terbesar, yakni penyediaan akomodasi makan dan minum, real estate dan konstruksi. (Merdeka.com 24 /11/2020).

Kontan.co.id– Kuala Lumpur. Dampak pandemi Covid-19 makin dirasakan oleh banyak negara. Kali ini Malaysia jadi negara yang merasakan langsung dampaknya. Channel News Asia melaporkan bahwa PDB Malaysia anjlok hingga 17,1% pada kuartal kedua tahun 2020. Menurut Departemen Statistik, ini adalah performa ekonomi terburuk Malaysia sejak krisis finansial pada tahun 1998. Gubernur Bank Sentral Malaysia, Nor Shamsiah Yunus, mengatakan pada konferensi pers hari ini, Jumat (14/8), bahwa sektor yang terkena dampak paling parah adalah pariwisata, manufaktur, dan investasi.

Dalam penelitian ini akan menguji pengaruh komisi audit dalam pengungkapan penyelenggaraan CSR ada perusahaan yang terdampak covid 19 di Negara Indonesia dan Malaysia, dengan variable control profitabilitas dan likuiditas.

Tinjauan Literatur dan Penembangan Hipotesis

Apuhami, Tashakor (2017) menyatakan dalam penelitiannya bahwa ukuran Komite Audit mengacu pada jumlah anggota di komite audit. Menurut rekomendasi ASX 4.2 (2010), AC harus memiliki minimal tiga anggota untuk memastikan memiliki keahlian yang memadai untuk melaksanakan tanggung jawab pemantauan dan pelaporan komite seperti pengungkapan CSR. AC membutuhkan sumber daya direktur dalam hal jumlah direktur dan masa jabatan mereka di komite untuk memungkinkan mereka melakukan peran pemantauan yang efektif dan meningkatkan pengungkapan CSR (Mangena dan Pike 2005; DeFond dan Francis 2005).

Sebuah komite audit yang lebih besar memiliki 'kekuatan yang diperlukan, keragaman keahlian dan pandangan untuk memastikan pemantauan yang tepat' yang mengarah pada pengungkapan CSR (Bedard et al. 2004: 18).

H₁ : Komite audit berpengaruh positif terhadap CSR pada perusahaan sektor Food and Beverage, Finance dan Real Estate negara Indonesia dan Malaysia

Ukuran Perusahaan:

Issa (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi sukarela kepada publik (Haniffa dan Cooke, 2005; Reverte, 2009; Khan, 2010; Sun et al., 2010; Gamerschlag et al., 2011; Al-Janadi et al., 2013; Basuony, 2014; Alturki, 2014; Giannarakis, 2014). Alasan di balik kesimpulan ini adalah bahwa perusahaan besar lebih terlihat dan karenanya menerima lebih banyak perhatian dari konstituen eksternal seperti pemerintah, media dan kelompok profesional dan masyarakat umum (Luoma dan Goodstein, 1999). Namun, beberapa penelitian tidak menemukan korelasi antara ukuran perusahaan dan pengungkapan sukarela, misalnya (Said et al., 2009; Hussainey et al., 2011; Al-Moataz dan Hussainey, 2012).

H₂ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap CSR pada perusahaan sektor Food and Beverage, Finance dan Real Estate negara Indonesia dan Malaysia

Profitabilitas:

Menurut Issa (2017) Perusahaan yang menguntungkan mengungkapkan lebih banyak pengungkapan sosial kepada audiens untuk melegitimasi keberadaan mereka (Haniffa dan Cooke, 2005). Korelasi positif antara pengungkapan sukarela dan profitabilitas dihipotesiskan dalam penelitian sebelumnya (lihat misalnya, Wang et al., 2008; Khan, 2010; Hussainey et al., 2011; Al-Moataz dan Hussainey 2012; Al-Janadi et al. 2013 ; Kansal et al., 2014; Giannarakis, 2014 dan Alturki, 2014). Beberapa penelitian tidak menemukan hubungan (lihat misalnya, Said et al., 2009; Reverte, 2009; Basuony, 2014; Aljifri et al., 2014; Barac et al., 2014). Belkaoui dan Karpik (1989) membenarkan bahwa penyebab yang mendasari korelasi positif antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan profitabilitas adalah pengetahuan manajemen. Manajer memiliki pengetahuan untuk membuat perusahaan mereka menguntungkan juga memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang tanggung jawab sosial. Ini mungkin memperjelas tingkat pengungkapan informasi sosial yang lebih tinggi oleh perusahaan yang menguntungkan.

H₃ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap CSR pada perusahaan sektor Food and Beverage, Finance dan Real Estate negara Indonesia dan Malaysia

Likuiditas

Abd-El Salam dan Weetman (2003) berpendapat bahwa perusahaan Mesir dengan likuiditas tinggi lebih cenderung melaporkan informasi sukarela untuk membedakan perusahaan mereka dari perusahaan dengan likuiditas rendah. Di sisi lain, orang mungkin berpendapat bahwa manajer perusahaan dari perusahaan dengan rasio likuiditas rendah dapat mempublikasikan lebih banyak informasi sukarela dalam laporan tahunan mereka untuk memenuhi persyaratan informasi dari pemangku kepentingan. Selain itu, Ezat dan El-Masry (2008) menemukan hubungan positif antara tingkat pelaporan internet perusahaan dan likuiditas, sedangkan Aly et al. (2010) tidak menemukan hubungan antara kedua variabel. Selain itu, Samaha dan Dahawa (2010) menemukan hubungan positif antara keseluruhan tingkat pengungkapan sukarela dan likuiditas; namun, mereka tidak menemukan hasil yang sama dalam studi terbaru mereka (Samaha dan Dahawa, 2011), ketika mereka menguji hubungan antara CSR dan likuiditas. Sejalan dengan argumen kami terkait dengan ukuran perusahaan dan profitabilitas, kami percaya bahwa perusahaan Mesir dengan rasio likuiditas tinggi lebih mungkin untuk membuat keputusan yang mahal (yaitu melaporkan informasi CSR secara sukarela dalam laporan mereka).

H₄ : Likuiditas berpengaruh positif terhadap CSR pada perusahaan sektor Food and Beverage, Finance dan Real Estate negara Indonesia dan Malaysia

Metode dan data

Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik dengan data diperoleh dari annual report pada Bursa Efek Indonesia pada negara Indonesia sedangkan untuk negara Malaysia annual report diperoleh dari Bursa Malaysia.

Sample

Sektor	Indonesia	Malaysia
Food and beverage	44	48
Property	90	172
Finance	192	56
	326	276

Data diambil dari bursa efek Jakarta dan Malaysia tahun 2019 dan 2020

Berikut persamaan regresi logistik :

$$Y = -0,638 + 1,529 X_1 - 0,123 X_2 + 0,110 X_3 + e$$

Keterangan:

Variabel	Proksi
CSR (Corporate Social Responsibility)	- Skor 1 untuk perusahaan dengan pengungkapan CSR lebih dari 2 halaman - Skor 0 untuk perusahaan dengan pengungkapan CSR kurang dari 2 halaman
KA (Komite audit, membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan)	Jumlah komite audit yang ada pada perusahaan
UP (ukuran perusahaan, menentukan besar kecilnya suatu perusahaan)	LN (Total Aset)
PR (profitabilitas, menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan)	Menggunakan laba bersih dan total aset
LK (likuiditas, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya)	Menggunakan aktiva lancar dan hutang lancar

Hasil dan Diskusi

A, Negara Indonesia

Negara Indonesia

Variabel	Minimum			Maksimum			Mean			Std. Dev		
	F&B	FNC	PRO	F&B	FNC	PRO	F&B	FNC	PRO	F&B	FNC	PRO
KA	3	1	2	5	8	4	3,09	3,35	3,01	,421	,886	,280
UP	16,26	12,56	13,54	31,18	21,1	30,55	26,79	21,1	26,03	4,266	5,14	4,43
PR	-,088	-,728	-,375	,416	,126	,443	,0865	,126	,013	,108	1,17	,0909
LK	,322	,011	,215	13,12	24,9	340,16	2,277	24,9	8,399	2,60	90,7	36,77
CSR	0	0	0	1	,78	1	,98	,78	,74	,151	,414	,439

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa statistik deskriptif dengan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini untuk sektor makanan sejumlah 44 sampel data, sektor finance

terdiri dari 192 sampel, sektor properti terdiri dari 90 sampel yang diambil dari laporan keuangan dan *annual report* yang dipublikasikan oleh perusahaan sektor makanan, finance dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2020. Nilai minimum paling rendah terdapat pada variabel profitabilitas pada sektor makanan dengan $-0,088$, lalu nilai maksimal tertinggi pada variabel ukuran perusahaan sektor makanan dengan hasil 31,187 dengan nilai rata-rata tertinggi pada variabel ukuran perusahaan sektor makanan dengan nilai 26,79.

B. Negara Malaysia

Negara Malaysia

Variabel	Minimum			Maksimum			Mean			Std. dev		
	F&B	FNC	PRO	F&B	FNC	PRO	F&B	FNC	PRO	F&B	FNC	PRO
KA	2	2	3	7	7	4	3,58	3,77	3,33	,964	,886	,648
UP	13,09	18,9	13,2	23,94	27,1	30,5	19,06	22,0	20,06	1,66	5,14	1,510
PR	-52,18	-,09	-16,5	1,119	,292	,443	-,976	,05	-,183	7,55	1,18	1,515
LK	,101	,064	,003	16,65	16,6	340,1	2,68	15,3	19,44	3,26	90,7	75,46
CSR	0	0	0	1	1	1	,94	,89	,51	,245	,414	,501

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa statistik deskriptif dengan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini untuk sektor makanan sejumlah 48 sampel data, sektor finance terdiri dari 56 sampel, sektor properti terdiri dari 172 sampel yang diambil dari laporan keuangan dan *annual report* yang dipublikasikan oleh perusahaan sektor makanan, finance dan properti yang terdaftar di Bursa Malaysia tahun 2019-2020. Nilai minimum paling rendah terdapat pada variabel profitabilitas pada sektor makanan dengan $-52,18$, lalu nilai maksimal tertinggi pada variabel likuiditas sektor properti dengan hasil 340,1 dengan nilai rata-rata tertinggi pada variabel ukuran perusahaan sektor finance dengan nilai 22,03.

C. Hasil Uji Hipotesis

Negara Indonesia

Sektor	Hipotesis	Prediksi	Hasil	Signifikasi prediksi	Signifikasi hasil
Food and perusahaan	Komite audit	+	+	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
	Ukuran	+	+	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh

beverage	Profitabilitas	+	+	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
	Likuiditas	+	+	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Tidak Berpengaruh					
Finance	Komite audit	+	+	Berpengaruh	Berpengaruh
	Ukuran perusahaan	+	+	Berpengaruh	Berpengaruh
	Profitabilitas	+	+	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
	Likuiditas	+	+	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Tidak Berpengaruh					
Properti	Komite audit	+	+	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
	Ukuran perusahaan	+	+	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
	Profitabilitas	+	+	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
	Likuiditas	+	+	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh

Tabel diatas menunjukkan variabel yang berpengaruh pada perusahaan negara Indonesia terdapat hanya pada sektor finance dengan variabel yang berpengaruh yaitu variabel komite audit dan ukuran perusahaan dengan hasil berpengaruh positif dan signifikan.

D.Hasil Uji Hipotesis Negara Malaysia

Negara Malaysia					
Sektor	Hipotesis	Prediksi	Hasil	Signifikasi prediksi	Signifikasi hasil
	Komite audit	+	+	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
	Ukuran perusahaan	+	+	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Food and beverage	Profitabilitas	+	+	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
	Likuiditas	+	+	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Tidak Berpengaruh					
Finance	Komite audit	+	+	Berpengaruh	Berpengaruh
	Ukuran perusahaan	+	+	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
	Profitabilitas	+	+	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
	Likuiditas	+	+	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh

Properti	Komite audit	+	+	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
	Ukuran perusahaan	+	+	Berpengaruh	Berpengaruh
	Profitabilitas	+	+	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
	Likuiditas	+	+	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh

Tabel diatas menunjukkan variabel yang berpengaruh pada perusahaan negara Malaysia terdapat pada sektor finance dan juga properti dengan variabel yang berpengaruh yaitu variabel komite audit dan ukuran perusahaan dengan hasil berpengaruh positif dan signifikan.

Robustness Test

Hasil dari robustnes test pada negara Indonesia dan Malaysia pada variabel komite audit memiliki hasil tidak terjadi robustness. Karena memiliki hasil yang berbeda pada hasil uji nya. Terdapat perbedaan dalam uji yang dilakukan variabel komite audit yang di proksikan dengan jumlah komite audit dan jumlah rapat komite audit.

Pada negara Malaysia satu sektor yaitu properti tidak memiliki persamaan dalam hasil uji nya sedangkan pada negara Indonesia sektor finance memiliki perbedaan hasil uji nya.

Kesimpulan

Negara Malaysia terdapat dua sektor yang variabelnya berpengaruh dan satu sektor pada negara Indoenesia dengan dengan variabel yang berpengaruh dari 2 negara adalah variabel komite audit dan ukuran perusahaan. Untuk uji robustness test tidak terjadi robust pada variabel komite audit dengan proksi jumlah komite audit dan jumlah rapat komite audit.

Keterbatasan

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel yang lebih beragam lagi karena masih banyak variabel yang berpengaruh terhadap *corporate social repsonsibility* selain dari variabel dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoglia, dkk. (2011). Principles-Based versus Rules-Based Accounting Standards: The Influence of Standard Precision and Audit Committee Strength on Financial Reporting Decisions. *The Accounting Review*, 86(3), 747—767.
- Appuhami, R. & Tashakor, S. (2017). The Impact of Audit Committee Characteristics on CSR Disclosure: An Analysis of Australian Firms. *Australian Accounting Review*. 0(0), 1—21.
- Alqatamin, dkk. (2018). Audit Committee Effectiveness and Company Performance: Evidence from Jordan. *Accounting and Finance Research*, 7(2), 48—60.
- Anisah, Helmi Nur. (2018). *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas, Likuiditas, Profil Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Laporan Tahunan*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).
- Carcello, J. & Neal, T. (2003). Audit Committee Characteristics and Auditor Dismissal Following “New” Going-Concern Reports. *The Accounting Review*, 78(1), 95—117.
- Chan, dkk. (2020). Does CSR reporting indicate strong corporate governance? *Strong Corporate governance*. 1—16. Diakses dari <https://www.emerald.com/insight/1834-7649.htm>.
- Dwekat, dkk. (2020). Corporate Governance Configurations and Corporate Social Responsibility Disclosure: Qualitative Comparative Analysis of Audit Committee and Board characteristics. *Corporate Social Responsibility Environmental Management*. 1—14. Diakses dari <https://doi.org/10.1002/csr.2009>
- Fauzzyah, R. & Rachmawati, S. (2018). The Effect Of Number Of Meetings Of The Board Of Commissioners, Independent Commissioners, Audit Committee And Ownership Structure Upon The Extent Of CSR Disclosure. *The Accounting Journal of BINANIAGA*, 3(2), 41—54.
- Mohammadi, dkk. (2020). The impact of board and audit committee characteristics on corporate social responsibility: evidence from the Iranian stock exchange. *Board and audit committee characteristics on CSR*. 1—30. Diakses dari <https://www.emerald.com/insight/1741-0401.htm>
- Musallam, Sami. (2018). The direct and indirect effect of the existence of risk management on the relationship between audit committee and corporate social responsibility disclosure. *Benchmarking: An International Journal*. 1—16. Diakses dari <https://doi.org/10.1108/BIJ-03-2018-0050>
- Qaderi, dkk. (2020). Audit Committee Features and CSR Disclosure: Additional Evidence From an Emerging Market. *International Journal of Financial Research*, 11(5), 226—237.
- Raimo, dkk. (2020). Do audit committee attributes influence integrated reporting quality? An agency theory viewpoint. *Business Strategy Environment*. 1—13. <https://doi.org/10.1002/bse.2635>
- Qaderi, dkk. (2020). Audit Committee Features and CSR Disclosure: Additional Evidence From an Emerging Market. *International Journal of Financial Research*, 11(5), 226—237.